**PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Amelia Nurfadilah1, Ali Umar Ash-Shidiq2, Adinda Sukma3, Andri Mardiansyah4, Anisa Pauji Lestari5, Winni Rizqi Rahmah6, Endah Ratna Sonya7

1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

8 Corresponding author ; amelianurfadilah014@gmail.com

**ABSTRACT**

*Two important dimensions of education in Indonesia which have often been a problem so far are the problem of widespread access to education and equality of education in Indonesia. These two problems are still a polemic in educational development in Indonesia. Many factors influence the implementation and distribution of education. Expansion is characterized by the ease with which society (citizens) can obtain education, while educational equality is a situation that is the same between the implementation of education carried out in both cities and villages. Through the literature, researchers looked at the implementation of educational equality in Indonesia, so it was found that the government was trying to provide rights based on UU No. 20 of 2003 through the educational equality program in the 3T area, so it was known that the initial explanation regarding this implementation was presented in the discourse on the importance of educational equality, then the basis The basis of the education equality policy was to look at the problems and also the quality of education itself. Afterwards, it was found that policies related to education equality had been implemented by the government through the 3T teaching undergraduate program and the realization of other programs which were considered to have an influence on the progress of education in Indonesia***.**

**Keyword : Equity, Development, Education**

**ABSTRAK**

Dua dimensi penting Pendidikan di Indonesia yang sering menjadi permasalahan selama ini yaitu masalah pada perluasan akses Pendidikan dan pemerataan Pendidikan di Indonesia. Dari kedua masalah itu sampai saat ini masih menjadi polemik di dalam Pembangunan Pendidikan di Indonesia. Banyak faktor yang memengaruhi di dalam pelaksanaan dan pemerataan Pendidikan tersebut. Perluasan ditandai dengan mudahnya masyarakat (warganegara) untuk memperoleh pendidikan, sedangkan pemerataan pendidikan adalah suatu kedaan yang sama antara pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan baik yang berada di kota maupun di desa. Melalui literatur pustaka peneliti melihatan impelentasi dari pemerataan pendidikan di Indonesia, sehingga didapati bahwa pemerintah berupaya memberikan hak atas dasar uu no 20 tahun 2003 melalui program pemerataan pendidikan di wilayah 3T, sehingga diketahui penjabaran awal terkait implementasi ini disajikan dalam wacana pentingnya pemerataan pendidikan, kemudian landasan dasar dari kebijakan pemerataan pendidikan tersebut hingga melihat permasalahan dan juga mutu pendidikan itu sendiri setelahnya didapati kebijakan terkait pemerataan pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui program sarjana mengajar 3T dan realisasi program lainnya yang dinilai memiliki pengaruh kedalam berjalannya pendidikan di Indonesia.

**Kata Kunnci : Pemerataan, Pembangunan, Pendidikan**

1. **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Dalam era globalisasi dewasa ini terjadi perubahan yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dihindarkan dari tsunami globalisasi yang telah memasuki setiap jengkal kehidupan manusia modern.

Pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia demi perkembangan pembangunan, sebab dasar pembangunan yang strategis adalah pendidikan. Pendidikan haruslah digunakan untuk mendidik segenap rakyat, bukan hanya untuk beberapa golongan tertentu saja. Oleh karena itu tugas negaralah yang harus mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa.

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini telah menyadari pentingnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran ini diperkuat dengan kenyataan pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu, pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan tuntutan konstitusi dimaksud, pemerintah berketetapan untuk membentuk lembaga yang bertanggungjawab pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa.

Pesan selanjutnya yang terkandung dalam UUD 1945 ialah pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil masyarakat. Dengan sendirinya sistem pendidikan nasional yang hanya mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia.

Pendidikan nasional adalah penddikan yang demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Sistem pendidikan nasional yang demokratis bukan berarti menolak kenyataan adanya perbedaan di dalam tingkat-tingkat kecerdasan manusia sebagai karunia Ilahi. Sistem pendidikan demokratis adalah memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**2.1 Pentingnya Sistem Pemerataan Pendidikan di Indonesia**

Sistem Pendidikan yang selama ini berlangsung di Indonesia dapat dikatakan kurang merata hingga tidak memberikan dampak dan perubahan yang signifikan terhadap pola pikir masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang umum terjadi di beberapa institusi Pendidikan, dimana institusi Pendidikan ini lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada meningkatkan mutu dan kualitas pendidikannya. Hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi siswa dan masa depannya, karena dapat mengakibatkan tidak meratanya sistem Pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini diakibatkan karena daerah-daerah di Indonesia yang dapat dikatakan "kurang" berkembang tidak merasakan sistem Pendidikan yang seharusnya dan tidak mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik. Sistem Pendidikan yang tidak merata ini dapat memberikan dampak buruk bagi masa depan bangsa Indonesia dimana beberapa kelompok masyarakat dari daerah tertentu tidak memiliki ilmu yang cukup untuk turut berperan dalam mengembangkan negaranya dan tidak dapat berkembang di masyarakat perkotaan.

Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang mengenai sistem Pendidikan di Indonesia agar dapat lebih merata. Setiap daerah baik perkotaan maupun pelosok seharusnya tetap mendapatkan ilmu dan pengajaran yang sama serta setara dengan kualitas pengajar dan fasilitas gedung yang cukup memadai. Setiap orang memiliki kemampuan dan kapasitas berpikir yang sama, sehingga adanya ketidakrataan Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat tidak adil dan patut dihilangkan dari sistem Pendidikan di Indonesia.

Pemerataan pendidikan di Indonesia dapat ditanggulangi dengan berbagai upaya dari pemerintah pusat dan warga di desa. Pemerintah dapat memaksimalkan perencanaan pendidikan untuk menangani kesenjangan dan kurangnya fasilitas di sekolah desa. Sarafah dan Wibowo (2018) juga menekankan perlunya upaya bersama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya dengan memperluas akses pendidikan anak usia dini, meningkatkan standar nasional, perizinan penyedia yang lebih kuat, dan pengembangan kader spesialis pengawas.

Idrus (2012) menambahkan bahwa pemerataan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan seimbang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing- masing daerah. Pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, tanpa membiarkan nuansa politik meracuni pendidikan. Peningkatan partisipasi pendidikan menengah atas juga penting untuk meningkatkan relevansi terhadap kehidupan dan pekerjaan siswa. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu dengan melakukan school review, benchmarking, quality assurance, dan quality control School review melibatkan semua pihak dalam proses perbaikan kualitas pendidikan secara terus-menerus. Benchmarking digunakan untuk menetapkan standar dan target mutu pendidikan melalui analisis SWOT. Quality assurance dan quality control merupakan kegiatan terencana dan sistematis untuk memenuhi standar mutu pendidikan dan mengecek penyimpangan kualitas yang tidak sesuai standar.

Selain itu, pemerataan pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti memaksimalkan perencanaan pendidikan di desa, memperluas akses pendidikan anak usia dini, meningkatkan standar nasional, perizinan penyedia yang lebih kuat, dan pengembangan kader spesialis pengawas. Pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, tanpa membiarkan nuansa politik meracuni pendidikan. Peningkatan partisipasi pendidikan menengah atas juga penting untuk meningkatkan relevansi terhadap kehidupan dan pekerjaan siswa.

Dalam rangka melakukan pemerataan pendidikan, penting untuk dilakukan secara menyeluruh dan seimbang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing- masing daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pendidikan dan penilaian terhadap pendidik secara terus- menerus sebagai bentuk umpan balik dan evaluasi bagi pendidik maupun sekolah.

Dalam menjalankan upaya pemerataan pendidikan, penting juga untuk memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik yang berkualitas. Diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan tenaga pendidik untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik.

**2.2 Kebijakan Pemerataan Pendidikan dalam UU No 20 Tahun 2003**

Perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu padanan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Perluasan pendidikan lebih menekankan bagaimana upaya pemerintah untuk mengadakan sarana dan prasaran pendidikan, kemudian penyediaan sarana dan prasaran tersebut mencapai seluruh pelosok nusantara atau daerah-daerah terpencil. Pemerataan pendidikan memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya, demikian juga tidak terdapat perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003.

Tanggung jawab pemerintah atau negara dalam membiayai dan menyediakan dana pendidikan sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Pasal 31 UUD 1945, ternyata dilaksanakan lain oleh Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Begitu juga sumber pendanaan pendidikan di dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pengalokasian anggaran pendidikan di dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 telah diatur dialokasikan minimal 20% dari APBN sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD selain alokasi gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) menyatakan Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap. Pendidikan juga dilakukan dengan mengupayakan kegiatan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah tentu tidak murah. Keberhasilan pendidikan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu, Pemerintah sudah sepantasnya memberikan perhatian terhadap pendidikan, terutama melalui alokasi dana untuk kegiatan pendidikan.

Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang (planning). Dalam membicarakan planning (perencanaan) pembangunan, maka setidak-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan sebagai metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan secara administrasi negara (public administration)
2. Pendekatan secara manajerial (management approach).

Pendekatan dengan cara manapun dipergunakan, baik secara administrasi negara manapun secara manajerial, kedua-duanya pasti terkait dengan tiga macam aspek, yaitu:

1. Aspek filsafat
2. Aspek hukum
3. Aspek politik.

Berkaitan dengan persoalan perluasan dan pemerataan pendidikan, maka pelaksanaan perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah secara komprehensif guna mewujudkan cita-cita dari UUD 1945

**2.3 Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Indonesia**

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, pendidikan Indonesia telah mencapai fokus utama dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesetaraan sosial. Dampak globalisasi terhadap pembangunan nasional Indonesia ini ialah transisi dari ekonomi pertanian menjadi perindustrian, yang didukung oleh sumber daya manusia yang terampil yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Dengan demikian, hal ini tentu saja membutuhkan SDM yang berkualitas dengan cara melalui proses pendidikan. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu negara, yang memiliki keanekaragaman budaya, geografis, dan sosial.. Namun, dibalik potensi besar itu, terdapat permasalahan yang kompleks dan mendalam yang perlu diatasi yaitu permasalahan pemerataan pendidikan. Di tengah berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam sektor pendidikan di Indonesia, masalah pemerataan pendidikan masih merupakan tantangan serius yang menghambat potensi pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi negara. Hingga saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan yang rumit dan berkelanjutan terkait ketidakmerataan dalam sektor pendidikan, memberikan dampak yang signifikan. Ketidakmerataan dalam pendidikan masih menjadi masalah yang mengganggu, menghambat potensi pertumbuhan, dan menciptakan ketidaksetaraan yang mencolok di berbagai wilayah dan antara kelompok-kelompok sosial.

Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia sendiri, kini belum cukup merata yang dimana menjadi kendala dan tanggung jawab pemerintah. Ketika berbicara pendidikan di Indonesia saat ini melihat dari segi kualitas masih sangat rendah dan tidak sesuai harapan. Maka, perlunya kerjasama antara pemerintah negara dan masyarakat itu sendiri, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk ditindak lanjuti. Persoalan pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan nasional diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memperoleh pendidikan dalam rangka memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, sehingga pendidikan menjadi alat pengembangan sumber daya manusia yang mendorong pembangunan. Persoalan pemerataan pendidikan muncul ketika masih banyak masyarakat, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat tertampung dalam sistem dan lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas yang ada. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pendidikan di Indonesia belum merata diantaranya:

1. Letak Geografis

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan memiliki keanekaragaman geografi. Keberagaman geografis Indonesia menjamin kekayaan alam dan budayanya yang beragam, selain itu juga menjadi permasalahan utama terjadinya ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menciptakan kesulitan dalam menyediakan akses pendidikan yang merata di seluruh pelosok negara. Dapat kita lihat, banyak sekolah khususnya di daerah pedesaan yang terpencil yang masih menghadapi persoalan dari segi infrastruktur dan fasiltas pendidikan terbatas, transportasi dan pengelolaan sumber daya manusia salah satunya ketersediaan guru yang kurang memadai.

1. Akses Internet

Akses internet yang kurang merata di Indonesia, menjadi faktor utama ketidakmerataan pendidikan. Khususnya daerah pedesaan yang kurang mampu atau daerah-daerah terpencil seringkali memiliki akses internet yang terbatas, bahkan tidak tersedia sama sekali. Sehingga mereka kesulitan untuk mengakses internet sebagai pembelajaran melalui via online. Hal ini menjadi hambatan dalam pembelajaran siswa, sebab dalam era digital, akses internet menjadi bagian terpenting dalam pendidikan jarak jauh.

1. Rendahnya Kesejahteraan Guru
2. Tingginya Tingkat Pemindahan Guru
3. Rendahnya Prestasi Anak
4. Mahalnya Biaya Pendidikan
5. Kualitas Kurikulum
6. Tantangan Sosial dan Keamanan

Tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan di daerah terpencil, yang dapat menyebabkan masalah pemerataan. Ini karena disebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kurangnya kemampuan institusi pendidikan untuk menjalankan pendidikan juga menyebabkan ketidakseimbangan pendidikan. Hal ini dapat terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak mencapai daerah terpencil. Oleh karena itu, mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak akan menerima pendidikan sesuai yang diharapkan.

Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada sebagian besar masyarakat Indonesia tidak bahkan belum pernah sama sekali belum pernah merasakan manisnya pendidikan. Jika diperhatikan, mengutip dari yang dikemukakan Idris (2016) bahwasannya masalah pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh:

1. adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat dari perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat.
2. perbedaan fasilitas pendidikan
3. Sebaran sekolah yang tidak merata
4. Nilai masuk yang tinggi di sekolah.
5. Rayonisasi

Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena permasalahan pendidikan di indonesia ini ialah segala macam bentuk maslaha yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Maka, Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah yang segera di tuntaskan akibat kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Mengutip pendapat Wibowo dari pemikiran Coleman (1968) mengungkapkan bahwa konsep kesetaraan atau pemerataan memiliki arti dimana memberikan pendidikan gratis hingga jenjang tertentu yang menjadi pintu utama untuk tenaga kerja, kurikulum umum yang relevan bagi semua anak dari berbagai latar belakang mereka, dan lain sebagainya yang menjadi landasan program pemerataan atau kesetaraan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

**2.4 Mutu Pendidikan dalam Pemerataan Pada Pendidikan di Indonesia**

Terkait dengan mutu Mardapi menyatakan bahwa, maka indikator dari kualitas pendidikan adalah kompetensi lulusan, yaitu kemampuan yang dimiliki lulusan. Kompetensi lulusan dapat berupa kemampuan yang dimiliki lulusan dicirikan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dapat ditampilkan. Lebih jauh diungkap Mardapi bahwa usaha memperbaiki kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pengajaran dan kualitas evaluasinya.

Memperbaiki kualitas pendidikan harus mencakup usaha untuk semakin menyempurnakan sistem evaluasi yang digunakan. Astin mengungkap bahwa ada tiga hal yang harus dievaluasi agar hasilnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga butir tersebut adalah masukan, lingkungan sekolah dan keluarannya (out atau lulusan). Terkait dengan aktivitas belajar, Penilaian hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semua proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai. Hasil belajar peserta didik tidak selalu mudah untuk dinilai. Sebagaimana diketahui, tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) relatif sulit untuk diamati, meski pun dapat diukur .

Majunya pendidikan dan kualitasnya merupakan salah satu faktor suatu bangsa bisa dikatakan maju, namun kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Seiring dengan kemajuan zaman yang begitu cepat ini, pendidikan yang diajarkan kepada peserta didik harus diimbangi dengan tingkat efektivitasnya sebab dengan begitu kualitas pendidikan dapat dikatakan baik jika peserta didik maupun lulusan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebaliknya, masalah bangsa Indonesia sedikit demi sedikit akan mulai teratasi apabila suatu mampu menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga. Mendikbudristek Nadiem Makariem menyatakan bahwa Indonesia tertinggal jauh dalam hal peniddikan dengan negara-negara tetangga, terlebih lagi pada pandemi saat ini, ketertinggalan itu semakin nyata adanya. Di dalam kategori kemampuan membaca posisi Indonesia berada pada peringkat 74 dengan rata-rata skor 371. Sedangkan dalam kategori kemampuan matematika, sains, dan membaca, ungkap Nadiem selaku Menteri Pendidikan

Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dikarenakan beberapa hal; petama, kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pembelajaran. Misalnya, kurangnya gedung kelas pada suatu sekolah yang menyebabkan jumlah murid disetiap melebihi kapasitas. Kedua, tenaga pendidik yang kurang profesional. Contohnya, guru yang disetiap masuk ke kelas hanya memberikan catatan kepada siswa dan tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai materi. Dan masih banyak lainnya seperti, kurangnya percaya diri dalam menjawab soal saat ujian sehingga para siswa lebih menyontek, tidak cocoknya pendidikan di Indonesia dengan kebutuhan pasar dunia kerja, biaya pendidikan yang mahal, pendidikan yang belum merata antar daerah. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, belum adanya akses ke polosok-pelosok menyebabkan pemerataan terhadap pendidikan untuk semua masyarakat kurang efektif, pendidikan mempunyai andil besar dalam peningkatan mutu SDM. Kualitas pendidikan yang baik, akan membuat bangsa semakin maju dan berkembang.

Melihat kekurangan tersebut upaya yang perlu dilakukan ialah mengadakan supervisi akademik. Mengembangkan proses belajar mengajar akan lebih baik dengan dilakukannya pembinaan kepada tenaga pendidik, hal ini merupakan tujuan dari supervisi akademik menurut pendapat Yushak Baharuddin, selaku supervisi pendidikan. Untuk meningkatkan profesi mengajarnya seperti : meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar; menjamin berjalannya kegiatan sekolah secara optimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; memperbaiki kesalahan dengan memberikan bimbingan langsung.

Kurikulum merdeka sebagai metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai keinginannya. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Guru tidak dapat memaksa siswa untuk mengusai seluruh materi yang ada dalam kurikulum. Guru harus memberikan keleluasaan kepada siswa agar berkembang sesuai dengan potensinya.

Di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan mutu atau kualitas pembelajaran agar mutu pendidikan di sekolah tetap terjaga bahkan berkembang. Sekolah harus menindaklanjuti melalui berbagai macam program dan kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkan potensi guru. Program tersebut dapat berupa seminar, workshop, dan pelatihan secara berkelanjutan agar guru menjadi lebih profesional. Dampaknya pada kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang bermutu.
 Pendidikan dikatakan berkualitas apabila proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berprestasi aktif. Selain itu juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut dapar memberikan keteladanan.

Lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu perlu melibatan lima faktor yang merupakan unsur dari lembaga tersebut, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, kurikulum, dan jaringan kerjasama. Kelima unsur ini harus terlibat dan saling berhubungan dalam mencapai pendidikan berkualitas. Kurikulum sekolah harus terdiversifikasi dengan program merdeka belajar agar dapat berjalan secara berkesinambungan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan adanya transformasi manajemen pendidikan ini melalui konsep merdeka belajar diharapkan mutu pembelajaran di sekolah dapat bermutu dan mampu mengahasilkan generasi bangsa yang bersaing secara global.

Di Indonesia, yang paling memerlukan pendidikan adalah mereka yang berada di daerah miskin dan terpencil. Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan bagi mereka adalah upaya penerapan cara non konvensional. Cara lain itu adalah memanfaatkan potensi, kemajuan serta keluwesan teknologi baru. Sekalipun teknologi baru seperti teknologi komunikasi, informasi dan adi-marga menawarkan pemerataan pendidikan dengan biaya yang relatif rendah, penggunaannya masih merupakan jurang pemisah antara ‘yang kaya’ dan ‘yang miskin’. Di samping itu, sekalipun teknologi dapat menjangkau yang tak terjangkau serta dapat menghadirkan pendidikan kepada warga belajar, mereka yang terlupakan tetap dirugikan karena bukan hanya tetap buta teknologi tetapi tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan. Mayoritas kaum miskin di Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh yang terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya; fasilitas, alat-alat transportasi dan komunikasi di samping rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi. Bila pendidikan ingin menjangkau mereka yang kurang beruntung ini kondisi yang proporsional harus diciptakan dengan memobilasasi sumber-sumber lokal dan nasional. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan penduduk ataupun antargender.

Kurangnya pemerataan dan carut-marut pendidikan kita selama ini disebabkan pendidikan dikelola tidak secara profesional. Terjadi bongkar pasang kebijakan secara tidak konsisten, misalnya; penerapan kurikulum CBSA, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan kurikulum KTSP. Penggantian nama dari SMA ke SMU kembali lagi ke SMA, sebelum diadakan evaluasi hasil pelaksanaannya.

Terbatasnya ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor terpenting penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Namun demikian berbagai sumber data termasuk SUSENAS 2004 mengungkapkan bahwa tidak semua peserta didik dapat mengakses buku pelajaran baik dengan membeli sendiri maupun disediakan oleh sekolah.

Pemarataan pendidikan formal

1. Pendidikan prasekolah dan sekolah dasar

Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pada anak usia dini, misal : playgroup dan taman kanak-kanak. Pada daerah perkotaan pendidikan prasekolah secara formal sudah sering ditemukan, tetapi untuk daerah terpencil seperti di pedesaan, masih sangat jarang dan mutunya sangat berbeda dengan pendidikan prasekolah yang ada di daerah perkotaan.

Pendidikan sekolah dasar memang sudah cukup dirasakan pemerataannya di berbagai daerah, hal ini sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun, tetapi mutu dari pendidikan tersebut masih sangat berbeda antara daerah perkotaan dengan pedesaan.

Ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, namun buku pelajaran yang diperlukan itu belum tersedia secara memadai, terutama dalam pendidikan dasar. Data Susenas 2004 dan sumber-sumber yang lain mengungkapkan bahwa tidak semua peserta didik dalam pendidikan dasar dapat mengakses buku pelajaran, baik dengan membeli sendiri maupun mendapat pinjaman dari sekolah. Adanya sekolah-sekolah yang membolehkan guru mata pelajaran menjual buku yang berharga tinggi juga menjadi permasalahan tersendiri. Penjualan buku-buku dengan harga yang cukup tinggi membuat masyarakat yang kurang mampu merasa terbebani.

1. Pendidikan menengah

Pada pendidikan menengah, saat ini banyak bermunculan sekolah-sekolah unggul. Dalam pelaksanaannya model sekolah ini hanya diperuntukkan untuk kalangan borjuis, elit, dan berduit yang ingin mempertahankan eksistensinya sebagai kalangan atas. Kalaupun ada peserta didik yang masuk ke sekolah dengan sistem subsidi silang itu hanya akal-akalan saja dari pihak sekolah untuk menghindari “image” di masyarakat sebagai sekolah mahal dan berkualitas,  sekolah plus, sekolah unggulan, sekolah alam, sekolah terpadu, sekolah eksperimen (laboratorium), sekolah full day, dan label-label lain yang melekat pada sekolah yang diasumsikan dengan “unggul”.

1. Pendidikan tinggi

Untuk pendidikan tinggi persoalannya menyangkut pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan tinggi bagi warga negara dalam kelompok usia 19-24 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi memang sangat besar, sehingga hanya anak-anak yang berasal dari keluarga mampu saja yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Kebutuhan biaya baik langsung maupun tak langsung yang cukup besar inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.

Penyebaran geografis lembaga pendidikan tinggi unggulan di Indonesia juga tidak merata. Berbagai universitas terkemuka dipusatkan berada di pulau Jawa, sehingga masyarakat yang berada di pulau lain harus meninggalkan kampung halamannya demi melanjutkan pendidikan tinggi.

Kritik kini mulai bermunculan atas pelaksanaan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) bagi beberapa universitas dan institut, seperti: UI, UGM, USU, UPI, ITB, dan IPB. BHMN dinilai telah mengarah ke komersialisasi pendidikan, yang bertentangan dengan misi utama sebuah lembaga pendidikan tinggi. Untuk bisa kuliah di universitas dan institut terpandang itu, orangtua mahasiswa harus mengeluarkan uang puluhan juta rupiah.

Ada beberapa argument yang menyebabkan muncul gerakan protes atas gejala komersialisasi pendidikan tinggi. Pertama, pendidikan tinggi yang selama ini bersifat elitis akan semakin bertambah elitis. Perguruan tinggi bertarif mahal akan makin mengentalkan watak elitisme dan kian mereduksi jiwa egalitarianisme. Gejala ini jelas bertentangan dengan prinsip pemerataan pendidikan seperti diamanatkan di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip dasar pemerataan ini sangat penting guna memberikan kesempatan bagi semua golongan masyarakat, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Kedua, ada alasan ideologis di balik gerakan protes itu. Selama ini, yang bisa menikmati pendidikan tinggi adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kelas menengah. Bagi orang-orang yang berasal dari kelas bawah (keluarga miskin) mengalami kesulitan mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan biaya yang mahal itu.

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh  pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara sedang berkembang. Peningkatan pemerataan pendidikan, diutamakan bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk. Kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian gunamencegah munculnya kecemburuan sosial. Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia ini terjadi pada lapisan masyarakat miskin. Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini disebabkan oleh faktor finansial atau keuangan Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup pada taraf yang tidak berkecukupan.

**2.5 Impelentasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan di Wilayah 3T**

Beranjak pada dasar Undang Undang yang dipakai serta menjadi bagian dari hukum utama yang diterapkan di Indonesia yakni Undang Undang dasar 45 yang didalam alinea keempat terdapat kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan pendidikan adalah upaya menuju cerdasnya kehidupan bangsa. Melalui dasar uu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjadi titik pokok untuk pemerataan akses pendidikan bagi rakyatnya. Program program pemerataan tersebut sudah banyak diterapkan dan juga direalisasikan.

Pemerataan Pendidikan untuk wilayah 3 T (Tertinggal, terdepan dan terluar) menjadi bentuk upaya dalam mempercepat pembangunan pendidikan di wilayah 3T, wilayah 3T ini adalah wilayah yang secara kondisi geografis, sosial, aspek ekonomi dan budaya yang memang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain yang dilihat dalam skala nasional. Maka bentuk upaya pemerintahan dalam melaksanakan amanah pembangunan pendidikan adalah melalui program terkait di wilayah 3T. Melalui program wajib belajar 12 Tahun Kemendikbud berupaya menjalankan kebijakan baru yang dibuatnya sebagai bentuk peningkatan mutu serta kualitas pendidikan ditanah air, maka dari itu wilayah 3T tidak menjadi pengecualian untuk mendapatkan akses pendidikan serta menuntaskan amanah wajib belajar 121 tahun yang dimulai pada tahun 2013 ini.

Bentuk dari implementasi dari program wajib belajar 12 Tahun ini masih kerap menemui kekurangan dan permasalahannya. Pokok titik permasalahan yang ada adalah kekurangan jumlah pendidik serta bagaimana angka putus sekolah yang terbilang tinggi, hingga angka partisipasi sekolah yang rendah. Selain itu, sarana prasarana yang belum memenuhi standart Pendidikan juga berbagai infrastruktur yang masih kesulitan untuk diakses masih kurang dalam mempermudah proses Pendidikan ini.

Wilayah 3T masih memiliki problem lainnya. Dalam (Astuti :2021) penelitiannya mengupas terkait kampung Mahamak di Mahakam ulu yang hasil implementasi wajib belajar ini masih belum berjalan baik dan terealisasikan dengan baik. Mengingat angka putus sekolah yang masih tinggi di wilayah tersebut, dan hal itu didasari oleh faktor ekonomi, keluarga, minat jugaa bagaimana jarak tempuh sekolah yang dinilai terlalu jauh untuk diakses para siswa tersebut.

Wajib belajar di 3T ini sebenarnya di pandang sebagai bentuk penanggulangan Pendidikan yang sulit diakses baik itu jangkauan ekonomi, jangkauang geografis hingga penggunaan teknologi oleh setiap anak. Kebijakan ini dinilai mampu menaikan target target angka partisipasi kasar (APK) pada tingkatan provinsi/kabupaten secara bertahap dan terus menerus. Tetapi hal tersebut tidak dapat tercapai apabila penunjang dalam program wajib Belajar ini tidak terpenuhi, yakni anggaran sekolah menengah yang perlu ditingkatkan, pemfokusan dana untuk Siswa atau Murid Murid miskin, peningkatan tenaga Pendidikan serta fasilitas yang diperlukan agar dapat memenuhi model pembelajaran yang dinilai relevan dengan kebutuhan siswa dalam upaya wajib belajar 12 tahun ini (Subijanto : 2014)

 Pendidikan di daerah Pongkar Kecamatan tebing Kabupaten Karimun menunjukan adanya ketidakselarasan. Dalam (Suhelayanti : 2019) implementasi kebijakan wajib belajar di daerah 3T pada fakta lapangannya belum dapat terealisasikan sebagaimana standart dan target yang diharapkan, baginya oemurus kebijakan serta perumus program atau para ahli rata rata berada di ibu kota yang pada dasarnya kondisi dan keadannya berbeda jauh dengan wilayah 3T. Daerah 3T ini selalu memiliki permasalahan yang sama, yakni belum dapat mendapatkan Pendidikan yang layak dan sama karena fakta kritisnya kondisi Pendidikan bangsa Indonesia belum merata secara skala besar. Kemudian pembangunan nasional yang dirasa sejak dahulu hanya berpusat di daerah Jawa saja, menjadi permasalahan sehingga wilayah luar Jawa menjadi kurang terfokuskan.

 Hasil penelitian (Kinanti :2021) terkait Peran orang tua dalam membantu penyelenggaraan pendidikan termasuk point wajib belajar 12 Tahun yang sedang dijalankan ini memiliki posisi dan peranan yang begitu penting. Karena kesadaran, bentuk tanggung jawab juga rasa peduli orang tua terhadap anak menjadi pilar dalam berhasilnya penyelenggaraan pendidikan yang dinilai bermutu. Tetapi hal tersebut dibantah dalam (Hakim : 2016) yang menyatakan bahwa realita pendidikan yang walaupun dinilai gratis, dan tanpa pungutan biaya secara gedung, spp dan operasional dasar, tetapi hal tersebut masih mendatangkan problematika, pasalnya para orang tua, para wali yang berada di wilayah 3T, cenderung menghalangi masuknya anak anak ke sekolah, karena memfokuskan anak anak untuk membantu bekerja dan mencari nafkah. Fakta sosial tersebut menunjukan program wajib belajar, Pendidikan, dan mutu pendidikan akan selalu berkaitan dengan masalah ekonomi dan kemiskinan.

Hal tersebut berhubungan dengan bagaimana pemprograman serta kebijakan lain yang dinilai sebagai upaya dari permasalahan dan juga bentuk mencapai capaian target yang telah ditentukan. Program Program dan kebijakan tersebut adalah kebijakan langsung dari pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sebagai upaya mempercepat Pembangunan Pendidikan didaerah 3T. Dengan Tagline Maju bersama Mencerdaskan Indonesia. Program program tersebut meliputi program sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dengan Kewenangan Tambahan (PPGT)

2. Program Sarjana mendidik didaerah 3T (SM-3T)

3. Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi Kolaboratif (PPGT Kolaboratif)

Program program tersebut dinilai sebagai jawaban terkait realisasi dan penunjang program lainnya, salah satunya Program wajib Belajar 12 tahun terlebih di wilayah 3T, program serta kebijakan tersebut adalah jawaban terkait permasalahan Pendidikan didaerah 3T.

Program Program ini dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi nilai nilai serta dasar uu no 20 tahun 2003, upaya tersebut dilaksanakan melalui program SM - 3T sebagai bentuk program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia yang difokuskan pada Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru tetap, dalam artian PNS/GTY atau Sepadannya, yang kemudian ditugaskan selama satu tahun di wilayah 3T. Program yang dilaksanakan sebagai jawaban dari membantu mengatasi Guru, sekaligus menyiapkan para calon guru yang profesional dengan dasar tangguh, bersifat mandiri, memiliki empati dan peduli terhadap sesama, serta jiwa untuk mencerdaskan anak bangsa.

Program SM-3T yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ini adalah memiliki lingkupan yang khusus atau penugasan yang harus dilaksanakan dalam program SM-3T ini, adapu lingkupan Program tersebut adalah dengan melaksanakan tugas tugas pembelajaran di satuan Pendidikan yang memang sesuai dengan bidang keahlian atau dilihat dari sudut tuntutan kondisi setempat, kemudian ikut serta mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah tempat bertugas, melakukan kegiatan ekstrakurikuler, serta membantu tugas tugas yang berkaitan erat dengan manajemen pendidikan di sekolah, kemudian tugas dalam pemberdayaan sosial atau pemberdayaan masyarakat untuk dapat mendukung program pembangunan pendidikan juga kebudayaan di daerah 3T.

Kasus terkait Program SM-3T ini dapat dilihat dari laporan terkait implementasi pemerataan Pendidikan di wilayah Konda Maloba, Kabupaten Sumba Tengah, yang dalam faktanya hanya terdapat satu SD dengan Fasilitas sekolah yang minim, buku - buku yang minim, serta guru yang jumlahnya sangat terbatas. Hal ini menjadi fokus untuk terlaksananya SM-3T di wilayah Konda Maloba, Sumba Tengah. Dalam (Tagela : 2022) kesenjangan pendidikan benar benar terlihat jelas, wilayah pedesaan Sumba Tengah sangat minim akses pendidikan, melalui program SM-3T wilayah ini ditugaskan beberapa guru yang kemudian melaksanakan lingkup SM-3T di SD Konda Maloba ini, melalui kebijakan program tersebut terdapat ilham penaikan tingkat "melek huruf" Yang dinilai mengalami kenaikan. Berdasarkan data Susenas BPS 2011-2022 , pada masa paska kemerdekaan buta huruf mencapai 95% dari penduduk yang ada, 15 tahun kemudian angka tersebut mampu ditekan menjadi 40%, hingga pada tahun 2022 mampu ditekan hingga angka 6,90% dari jumlah penduduk yang ada. Hal tersebut dilihat pula dari penduduk Sumba yang melalui program SM-3T mampu menekan angka Buta Huruf, dari hal tersebut dinilai bahwa beberapa bagian target pencapaian dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sedang menuju proses kepada tingkat yang dinilai mampu mencapai target. Tetapi hal tersebut hanya dilihat dari program SM-3T yang dilaksanakan di Sumba Tengah, sedangkan wilayah Indonesia yang begitu luas, dan faktanya masih terdapat daerah 3T yang belum mencapai hal yang sama seperti dasarnya di Sumba Tengah.

Untuk mendapatkan hasil nyata dari implementasi pemerataan pendidikan ini harus melihat dari berbagai sudut, harus secara merata melihat secara utuh kebutuhan dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah tentu saja melihat kesenjangan ini secara cermat, maka bentuk program yang sedang digulirkan ini adalah bentuk implementasi dan upaya menuju kehidupan cerdas anak bangsa, pada dasarnya Pembangunan Pendidikan ini memerlukan effort dan juga proses yang cukup panjang

1. **Kesimpulan**

Kondisi geografis, sosial budaya bangsa Indonesia yang sangat heterogen berdampak terhadap ragamnya kondisi warga Indonesia. Ada yang mudah mengakses pendidikan, sebaliknya banyak yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan disebabkan berbagai kendala yang dihadapi. Kondisi obyektif inilah yang membuat pemerataan pendidikan baik dalam jumlah maupun pelayanan bermutu belum dapat dituntaskan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah yang luas dan secara geografis maupun sosiokultural sangat heterogen, pada beberapa wilayah penyelenggaraan pendidikan masih terdapat berbagai permasalahan, terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (daerah 3T).

Proses implementasi wajib belajar di daerah 3T berhubungan dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dariberbagai pihak yang terlibat dalamprogram wajib belajar. Tujuan implementasi kebijakan wajib belajar di daerah 3T adalah untuk meningkatkan APK dan menurunkan angka anak putus sekolah di daerah 3T. Dalam implementasi kebijakan wajib belajar terdapat proses yang harus dilalui dan proses tersebut tidak terlepas dari suatu kendala yang terjadi di lapangan seperti kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses menuju ke sekolah dan minimnya fasilitas pendidikan di suatu daerah. Strategi pemerintah untuk menyelesaikan kendala dengan cara pembangunan fasilitas sekolah, beasiswa pendidikan, perbaikan akses pendidikan dan sosialisasi pentingnya pendidikan dilakukan dengan pendekatan struktural dan pendekatan perilaku yang harus ditempuh. Hal ini semata demi mewujudkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan wajib belajar di daerah 3T.

Kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia seringkali tidak menjangkau hingga seluruh pelosok negeri, keberhasilan yang diproklamirkan pemerintah pada masyarakat hanya milik beberapa daerah saja seperti jawa, bali dan sebagian sumatera, namun sebagian lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, potret-potret kesenjangangan yang terjadi dari berbagai kebijakan yang ada terkesan tertutupi oleh pencapaian prestasi di beberapa wilayah saja. Terutama di wilayah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal, tingginya angka putus sekolah, akibat sulitnya menjangkau sekolah di wilayah tersebut, buruknya fasilitas yang ada serta kualitas dan kuantitas guru yang tersedia. Maka kebijakan yangg diambil pemerintah dirasa tidak adil bagi rakyat di wilayah itu, apalagi mereka yang berada di perbatasan melihat negara tetangga sebagai pembandinnya. Untuk menuntaskan masalah-masalah pendidikan yang ada, diperlukan kebijakan yang menyeluruh bukan hanya yang bersifat parsial, dan kebijakan yangg diambil bukanlah sebuah program ‘trial and error’. Reformasi kebijakan pendidikan yang mendasar dan lebih fokus memperhatikan kondisi aktual di tengah masyarakat dan memberikan prioritas yang tinggi untuk pendidikan masyarakat yang kurang mampu dan kurang pintar, untuk kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah pemerintah pusat harus lebih adil dan lebih memperhatikan pendidikan di daerah pedesaan serta perbatasan yang masih tergolong daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Pemerintah perlu mengadakan program khusus untuk mendukung implementasi wajib belajar 12 tahun di daerah 3T, lebih memperhatikan kembali program program mengajar dan kesejahteraan guru yang dikirim kepelosok agar alokasi daya guna, keprofesionalan dan juga mutu dapat terjaga dengan baik sesuai dengan kompensasi keharusan seorang guru dalam urusan mencerdaskan kehidupan bagsa

**Referensi**

Ardika, I. Wayan Dana, AA Raka Sitawati, and Ni Ketut Suciani. “FENOMENA POKOK PENDIDIKAN INDONESIA: APA DAN BAGAIMANA?.” *SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora [Journal of Social Sciences and Humanities] 3.1 (2017): 96.*

Aristo, VJ. thomas. 2019. Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikann, Vol. 7[1], h. 25-34.* [http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp *(Diakses*](http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp%20%28Diakses) *pada tanggal 22 September 2023, 14.00 WIB)*

Bappenas. 2018. *Indonesia Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Progress Report*. Jakarta: BPN.

BPS. (2018). *Sistem Zonasi : Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Jakarta

Hakim, L. (2016). *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jurnal Edu Tech , 53-64

Idrus, M. (2012). *Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di daerah [Quality of Education and Equitable Education in Regions],* Psikopedagogia, 1(2), 1-10,

Idrus, M. 2016. Mutu Pendidikan Dan Pemerataan Pendidikan di Daerah. *PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan dan Konseling, V.1, No.2*

Idrus, Muhammad. 2012. “PSIKOPEDAGOGIA.” *MUTU PENDIDIKAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DAERAH* 1, no. 2 (Desember): 3-4. http://journal.uad.ac.id/index.php/PSIKOPEDAGOGIA/article/download/4603/2809.

Kinanti, D. A., & Trihantoyo, S. (2021). *Urgensi Partisipasi Orang Tua Siswa Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu*. Jurnal Inspirasi Pendidikan Volume 9 No. 2 , 256-264.

Masing, M., & Astuti, K. (2021). *Putus Sekolah Sebagai Tantangan Pendidikan Daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan)*. Jurnal Universitas Negeri Malang ,140-148.

Megawanti, P. (2012). *Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Formatif, 2(3), 227-234.

Mujahidun. (2017). PEMERATAAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA: PENDIDIKAN GRATIS VERSUS KAPITALISME PENDIDIKAN. *Tarbiyatuna, V 8(1), 1–8*.

Munthe, A. P. (2015). *Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. Scholaria*: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 5(2). https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.12.p1-14 1-14.

Permadi, Galih. 2023. “Meningkatkan Mutu Pendidikan di Era Kurikulum Merdeka.” https://jateng.tribunnews.com/2023/03/26/meningkatkan-mutu-pendidikan-di-era-kurikulum-merdeka.

PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. (2018). *Profil Lulusan, Universitas PGRI Yogyakarta*. https://pgsd.upy.ac.id/index.php/jadwal/profil-lulusan/2- uncategorised/12-pendidikan

Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). *Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. Lentera Pendidikan*: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 21(2), 206, https://doi.org/10.24252/ip.2018v21n2i6

Sahira, S. (2023). *Perencanaan Pemerataan Pendidikan di Pelosok Desa Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Proceedings Series of Educational Studies, 1(1). LievenaN, https://bem.petra.ac.id/spetrakuler/main/submission/bim/essay\_indo/b12200069@john.petra.ac.id418d8681b964b0a772325e03a076bb26.pdf

Suhelayanti. (2019). *Analisis Kebijakan Pendidikan.* Jurnal Lentera , 11-26

Tagela, umbu (2022). *Analisis Kebijakan Pendidikan Pemerataan Pendidikan di Daerah 3T Kabupaten Sumba Tengah*. Jurnal Pendidikan dan Humaniora. Vol 1 No 1, 14 -15

Wahyudi, Lestari E. 2022. “Madrasah Innovation and Aswaja Studies.” *Mengukur Kualitas Pendidikan di Indonesia* 1, no. 1 (mei): 18-22. https://jurnal.maarifnumalang.id/.

Wardani, Elisabeth Dwi K. 2023. “Pemerataan Pendidikan sebagai Awal Merdeka Belajar : Merdeka itu Merata.” https://www.ghibahin.id/esai/pemerataan-pendidikan-sebagai-awal-merdeka-belajar-merdeka-itu-merata/.

Zulkarnaen dan Handoyo, D. Ari. 2019. Fakto-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*. <https://scholar.google.co.id/scholar?q=faktor-faktor+penyebab+pendidikan+tidak+merata+di+indonesia+karya+zulkarnaen&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart> *(Diakses pada tanggal 22 September 2023, 14.10 WIB*